BAB III
PUBLIKASI, DOKUMENTASI, DAN TEKHNOLOGi INFORMASI

1. Desain Bahan Cetak

Desain bahan cetak untuk kegiatan ini meliputi:

- Logo Kegiatan
- *X-Banner*
- *Wall of Fame*
- *Welcoming Card*
- Sertifikat
- *ID Badge* (Panitia dan Peserta)
- *Deskplate*
- *Backdrop*
- *Web Banner*
- *Blocknote*
- *Cover Program Book*
- *Que Card*

Committee ID Badge

X-Banner

Secara khusus, badge yang digunakan oleh Panitia (*committee*) dan Peserta (*Participants*) untuk kegiatan IEM merupakan badge percontohan yang pertama kali menggunakan sistem QR code, dimana di dalam QR code tersebut terdapat seluruh informasi update terkait penyelenggaraan yang meliputi:

- Berita Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
- Bahan Paparan
- Program Book
- Sertifikat Peserta
- Sertifikat Panitia

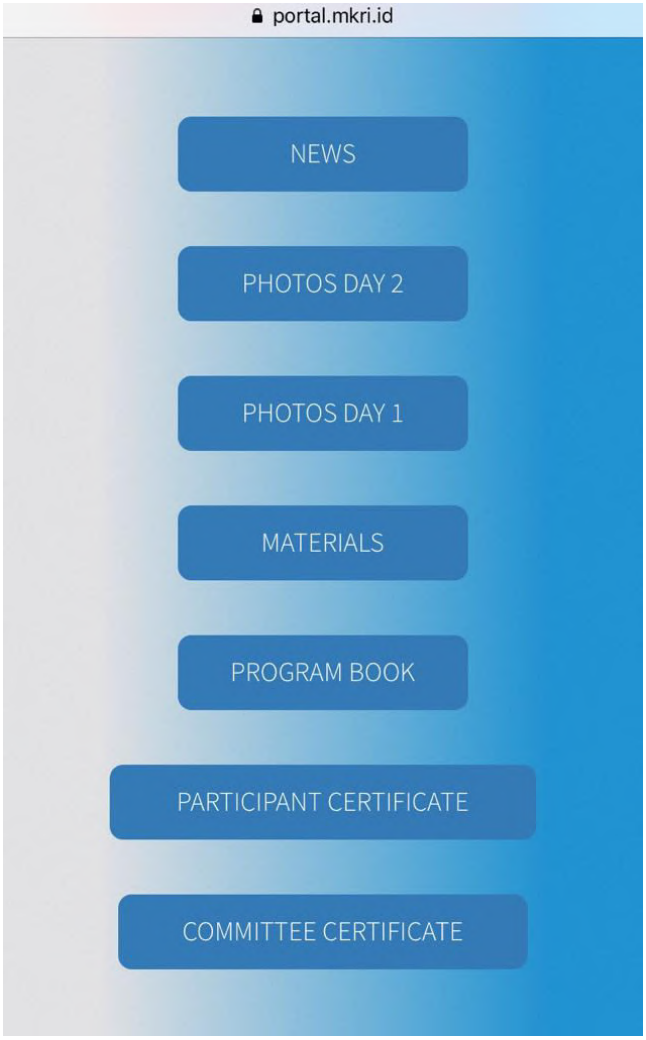

Adapun desain selengkapnya dari masing-masing bahan cetak tersebut dapat dilihat di lampiran pada laporan kegiatan ini.

2. Publikasi Berita

Pemberitaan mengenai kegiatan ini di media terbagi menjadi dua, yaitu pemberitaan di laman resmi MKRI dan jejaring sosial Instagram.

a. Laman Resmi MKRI (www.mkri.id)

Terdapat 9 (sembilan) berita di laman MKRI yang meliput tentang kegiatan ini. Berikut adalah kutipan berita dimaksud. Berita selengkapnya terlampir pada laporan ini.

Tingkatkan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi Warga Negara, MKRI Gelar The 1st International Expert Meeting 2019

Jumat, 20 September 2019 | 09:50 WIB

Video Cetak Dibaca: 1407697

Ketua MK Anwar Usman memberikan sambutan pembukaan kegiatan International Expert Meeting 2019, Serpong (20/9). Foto Humas/Ifa.

(Sumber: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15842)

Hamdan Zoelva : Hak Asasi Dibatasi Undang-Undang Guna Hormati Hak Orang Lain

Jumat, 20 September 2019 | 14:45 WIB

Cetak Dibaca: 1407745

Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2015 Hamdan Zoelva menjadi pembicara dalam acara The 1st International Expert Meeting 2019, Serpong (20/9). Foto Humas/Ifa.

(Sumber: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15843)

Robert French: Pentingnya Batasan Peran Peradilan dalam Berbagai Konstitusi di Negara Manapun

Jumat, 20 September 2019 | 17:50 WIB

Cetak Dibaca: 1407707

Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Australia Robert French menjadi pembicara dalam The 1st International Expert Meeting 2019 yang digelar pada Jumat (20/9/2019) di Serpong, Tangerang Selatan. Foto Humas/Ifa

(Sumber: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15844)

Hennie Strydom : Perkembangan Penerapan Konvensi Internasional 1966

Jumat, 20 September 2019 | 20:45 WIB

Cetak Dibaca: 1407693

Hennie Strydom dari Universitas Johannesburg, Afrika Selatan, menyampaikan materi bertajuk "Role of the Judiciary to Promote Social Justice: The Protection of Socio-Economic Rights in International Law". Foto Humas/Ifa

(Sumber: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15845)

Revisi Ketentuan Batas Usia Perkawinan: Pemenuhan Hak Sosial-Ekonomi Warga Negara

Sabtu, 21 September 2019 | 09:56 WIB

Cetak Dibaca: 1407655

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bicara tentang Revisi Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Pemenuhan Hak Sosial-Ekonomi Warga Negara. Foto Humas/Ifa

(Sumber: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15848)

Joseph Marko: Pascagenosida, Bosnia-Herzegovina Butuh Merekonstruksi Falsafah Negara

Sabtu, 21 September 2019 | 13:38 WIB

Cetak Dibaca: 1407682

Mantan Hakim MK Bosnia-Herzegovina Joseph Marko bicara tentang falsafah negara Bosnia, Foto Humas/Ifa.

(Sumber: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15850)

Indu Malhotra: Pengadilan di India Butuh Waktu Lama Untuk Lindungi Hak Perempuan

Sabtu, 21 September 2019 | 13:29 WIB

Cetak Dibaca: 1407663

Hakim Mahkamah Agung India Indu Maholtra menjadi pembicara dalam acara International Expert Meeting di Serpong (21/09). Foto Humas/Ifa.

(Sumber: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15849)

Saldi Isra: Usai Amendemen, Indonesia Bentuk MK Guna Laksanakan Kewenangan Konstitusional

Sabtu, 21 September 2019 | 17:17 WIB

Cetak Dibaca: 1407953

Hakim Konstitusi Saldi Isra bicara tentang Amandemen Konstitusi, Foto Humas/Ifa.

(Sumber: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15852)

Surya Dhungel : Membuat Konstitusi Merupakan Proses Dari Perdamaian

Sabtu, 21 September 2019 | 16:30 WIB

Cetak Dibaca: 1407788

Surya Dhungel dari Mahkamah Agung Nepal dan Profesor Universitas Kathmandu menjadi pembicara dalam The 1st International Expert Meeting 2019. Foto Humas/Ifa

(Sumber: https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15851)

b. Instagram MKRI (@MahkamahKonstitusi)

https://www.instagram.com/p/B2qHBf7HBK0/?igshid=eyb5j09e6b8r

https://www.instagram.com/p/B2qHX1AHJyr/?igshid=7e4cdu6004zd

BAB IV
PROTOKOL, AKOMODASI, TRANSPORTASI, DAN PERLENGKAPAN

Seksi protokol dan transportasi bertanggungjawab terhadap kedatangan dan kepulangan delegasi dari bandara internasional Soekarno-Hatta. Kendaraan yang digunakan untuk mobilisasi delegasi adalah Toyota Innova Reborn sebanyak 3 (tiga) mobil. Selain pendampingan dari Kedutaan Besar India untuk delegasi dari Mahkamah Agung India, yaitu Hakim dan Panitera, tidak ada pendampingan tambahan selain dari protokol Mahkamah Konstitusi. Adapun jadwal kedatangan dan kepulangan delegasi terlampir pada lampiran laporan ini.

Akomodasi untuk delegasi dan sebagian besar panitia adalah sama dengan lokasi acara, yaitu JHL Solitaire, Gading Serpong. Sementara untuk sebagian panitia lainnya disediakan akomodasi di Fame Hotel, Gading Serpong, karena keterbatasan ketersediaan kamar.

Premier Room JHL Solitaire

Dining Room JHL Solitaire

Fame Hotel Gading Serpong

Dalam hal perlengkapan yang disediakan langsung oleh seksi perlengkapan hanya meliputi sarana prasarana IT, dan sebagian besar perlengkapan lainnya disediakan oleh mitra kerja.

BAB V
KEUANGAN DAN PENGAWASAN

1. Keuangan

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan International Expert Meeting adalah berjumlah total **Rp. 1.171.284.319, - (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah)** yang secara garis besar dibagi dalam dua periode, yaitu:

a. Anggaran untuk Periode Persiapan : Rp. 70.901.489 (Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), dan
b. Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp. 1.100.383.830,- (Satu Milyar Seratus Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Adapun anggaran pelaksanaan kegiatan, dikelompokkan dalam beberapa mata anggaran sebagai berikut:

• Honor Output Kegiatan	Rp. 17.000.000
• Belanja Bahan	Rp. 264.224.200
• Belansa Sewa	Rp. 61.050.000
• Belanja Barang non Operasional	Rp. 49.351.741
• Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	Rp. 489.700.000
• Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 124.464.001
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 8.400.000
• Belanja Perjalan Dinas Luar Negeri	Rp. 49.246.940
• Belanja Jasa Lainnya	Rp. 25.945.948
• Belanja Jasa Profesi	Rp. 11.000.000

Untuk detail laporan keuangan, terdapat dalam lampiran pada laporan ini.

2. Pengawasan

i. Ringkasan Eksekutif

Kegiatan *The 1st International Expert Meeting* dilaksanakan di Hotel JHL Solitaire Tangerang, pada tanggal 20 s.d 21 September 2019. Pembiayaan kegiatan tersebut dibebankan pada Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2019, melalui perjanjian kerjasama atau tender untuk pengadaan barang dan serta secara swakelola untuk pelaksanaan administrasi lainnya seperti perjalanan dinas (SPPD).

Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 117 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *The 1st International Expert Meeting* Tahun 2019, kami dari panitia bidang pengawasan telah melaksanakan kegiatan pengendalian atas kegiatan dimaksud. Pelaksanaan pengawasan berupa pendampingan konsultatif meliputi monitoring pengamatan pelaksanaan di lapangan. Mekanisme pengendalian yang dilakukan menggunakan pendekatan pengawasan berorientasi hasil sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat dan *stakeholder*.

Berdasarkan hasil pengawasan atas kegiatan dimaksud dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1) Secara umum, kami menilai bahwa penyelenggaraan *The 1st International Expert Meeting* yang diselenggarakan di Hotel JHL Solitaire Tangerang pada tanggal 20 s.d 21 September 2019 telah berjalan dengan sukses.
2) Pelaksanaan teknis pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan penunjukan langsung, sebagaimana prosedurnya didasari pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

ii. Tujuan dan Sasaran Pengawasan

Tujuan dan sasaran dari dilaksanakannya pengawasan atas kegiatan *The 1st International Expert Meeting* adalah untuk :

1) Membantu suksesnya pelaksanaankegiatan Expert Meeting;
2) Memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) atas penyelenggaraan kegiatan Expert Meeting telah dilakukan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran hasil pengawasan adalah pimpinan dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi guna memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan Expert Meeting telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

iii. Ruang Lingkup Pengawasan

Pengawasan dititikberatkan pada pemantauan pelaksanaan kegiatan dan item pekerjaan sesuai perjanjian kerja yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan terjadinya kelemahan pengendalian.

iv. Batas Tanggungjawab

Tanggung jawab Tim Bidang terbatas pada simpulan hasil pendampingan berdasarkan data/ dokumen formal yang diperoleh, sedangkan kebenaran formal dan material data/ dokumen merupakan tanggung jawab PPK (Mahkamah Konstitusi).

v. Uraian Hasil Pengawasan

Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan meliputi keikutsertaan tim dalam rapat koordinasi persiapan kegiatan *The 1st International Expert Meeting,* memberikan konsultasi dalam rencana persiapan acara mulai dari penyusunan RAB dan hal-hal teknis lainnya.

Tahap Pelaksanaan

Pada kegiatan *The 1st International Expert Meeting,* telah dilakukan pemantauan terhadap beberapa komponen pengadaan barang dan jasa, meliputi :

1) Akomodasi
2) Meeting Equitment
3) Interpreter
4) Seminat Kit dan Souvenir
5) Entertainment

Untuk hasil pengamatan kami lebih lanjut pada kegiatan *The 1st International Expert Meeting* pada tanggal 20 s.d 21 September 2019 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

BAB VI
PENUTUP

Sebagai penutup laporan kegiatan *"The 1st International Expert Meeting"*, kami dapat sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Simpulan Kegiatan

1. *"The 1st International Expert Meeting"* telah terselenggara dengan baik pada tanggal 20-21 November 2019 dengan tema: *Constitutional Dialogue: The Role of the Judiciary to Promote Social Justice - The Protection of Socio Economic Rights*;
2. Persiapan Kegiatan *"The 1st International Expert Meeting"* telah dimulai pada minggu ke-4 bulan Februari 2019, dengan jumlah total rapat persiapan sebanyak 8 kali pertemuan, dimana salah satu diantaranya rapat persiapan dengan Prof. Bertus De Viliers sebagai *Key Facilitator* kegiatan tersebut;
3. Adapun secara keseluruhan kegiatan ini dihadiri oleh 53 peserta yang terdiri dari 45 peserta dalam negeri dan 8 peserta luar negeri, serta melibatkan 41 panitia dan staff pendukung, serta 35 pengemudi dan patwal.
4. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan *"The 1st International Expert Meeting"* berjumlah total Rp. 1.171.284.319, - (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang dibagi dalam dua periode, yaitu: Anggaran untuk Periode Persiapan sebesar Rp. 70.901.489 dan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp. 1.100.383.830,-

b. Catatan Keunggulan

1. Pemilihan tema merupakan tema spesifik yang sesuai dengan kebutuhan MKRI, dimana putusan putusan MK selalu berkaitan dengan Hak Sosial Ekonomi masyarakat, lebih lanjut, tema ini juga dapat meng-ekspos beberapa putusan fenomenal MKRI, diantaranya: Putusan tentang usia perkawinan, Putusan tentang alokasi dana pendidikan dalam APBN, Putusan tentang Sumber Daya Air, Putusan tentang Hak Masyarakat Hukum adat atas Hutan Adat, Hak Keperdataan anak diluar nikah, dsb.
2. Dari sisi format acara, kegiatan ini telah mengedepankan diskusi yang lebih cair ketimbang Simposium Internasional, dimana para narasumber, responden dan peserta lainnya dapat bertukar pendapat dengan lebih mendalam dikarenakan mayoritas bahan paparan telah disampaikan kepada seluruh peserta sekurang-kurangnya satu minggu sebelum kegiatan diselenggarakan;
3. Kegiatan International Expert Meeting merupakan pelopor penggunaan QR Code dalam badge / id Card peserta kegiatan, yang didalammnya berisi: Berita

Kegiatan, Dokumentasi Kegiatan, Bahan Paparan, Program Book, Sertifikat Peserta dan Sertifikat Panitia. Dimana selepas kegiatan International Expert Meeting, berbagai kegiatan di MKRI juga telah menerapkan dan mengembangkan hal yang serupa;

4. Para Peserta dari Mancanegara menyatakan dengan terbuka apresiasi terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kegiatan, dimana selain disampaikan secara lisan pada penutupan acara, juga disampaikan pasca kegiatan oleh Prof. Bertus De Viliers (Curtin University) yang telah mengajukan tema untuk kegiatan serupa di tahun 2020; Justice Robert French (High Court / Western Australia University) yang mengundang delegasi MKRI untuk berkunjung ke Australia dan bekerjasama dengan Western Australia University; Imogen Canavan (Max Planck Institute) yang menyampaikan ketertarikan untuk memiliki MoU antara MKRI dan Max Planck Institute, serta Prof. Surya Dungel (Nepal) yang mengundang delegasi MKRI turut serta dalam International Simposium di Kathmandu, Nepal pada Desember 2019.

c. Catatan Perbaikan kedepan

1. Kegiatan International Expert Meeting merupakan kegiatan diskusi ilmiah dengan sasaran utama memberikan ruang diskusi bagi para hakim konstitusi dengan para pakar dan praktisi hukum dari mancanegara. Namun dikarenakan jadwal kegiatan yang padat, Kegiatan ini belum dapat diikuti oleh seluruh Hakim Konstitusi;
2. Terdapat kendala dalam pengumpulan materi / bahan paparan dari Narasumber dalam negeri, dimana rata-rata para Narasumber dimaksud memberikan materi paparannya pada H-1 atau pada hari penyelenggaraan kegiatan, dimana memberikan waktu yang terbatas bagi para peserta untuk mempelajari paparan dimaksud terlebih dahulu;
3. Beberapa Narasumber masih membutuhkan waktu atau penulisan ulang dengan format yang sesuai untuk penerbitan Jurnal Internasional Constitutional Review Special Edition.

IEM
INTERNATIONAL
EXPERT MEETING
2019

CONTACT

Location:
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Indonesia, Jakarta 10110

Email:
joic@mkri.id

Call:
+6221 23529000

Your Name

Your Email

Subject

Message

Send Message

ADMINISTRASI UMUM

AKUNTABILITAS PUBLIK
- RENCANA STRATEGIS
- INFORMASI ANGGARAN
- LAKIP
- LAPORAN KEUANGAN
- DAFTAR INVENTARIS BARANG
- DAFTAR PNBP
- PELAYANAN PUBLIK
- PPID

KEPEGAWAIAN
- LHKPN
- STATISTIK PEGAWAI
- DATA PEGAWAI

PENELITIAN
- HASIL PENELITIAN

KEHUMASAN
- KERJASAMA
- SISPIM MK
- LINK
- REFORMASI BIROKRASI

INFORMASI
- INFORMASI LELANG
- PENGUMUMAN
- LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI RI

BERANDA > INFORMASI ADMINISTRASI > SIARAN PERS AND NEWS LETTER

SIARAN PERS AND NEWS LETTER

SIARAN PERS | NEWS LETTER

Tanggal	Judul	
Rabu, 16 Juni 2021	Pemerintah Akan Hadirkan Saksi dalam Sidang Uji UU Minerba	Di Unduh : 1
Rabu, 16 Juni 2021	Merasa Dipailitkan Tanpa Diberikan Kesempatan Membuktikan, Pemohon Ajukan Pengujian UU Kepailitan	Di Unduh : 4
Rabu, 16 Juni 2021	Pemohon Merasa Tidak Mendapat Keadilan Dalam Sengketa, UU Kepailitan di Ajukan	Di Unduh : 3
Rabu, 16 Juni 2021	Pemerintah Akan Beri Keterangan terhadap Enam Perkara Uji Formil UU Cipta Kerja	Di Unduh : 1
Rabu, 16 Juni 2021	Ketentuan Seleksi, Pengangkatan dan Penetapan Jabatan Guru Besar Diuji ke MK	Di Unduh : 1
Rabu, 16 Juni 2021	Tak Atur Tindak Pidana Ancaman Hukuman di Bawah 4 Tahun, UU TPPU Diuji	Di Unduh : 4
Senin, 14 Juni 2021	MK Kembali Sidangkan Perkara Pengujian UU MK	Di Unduh : 2
Senin, 14 Juni 2021	Pemerintah dan Pihak Terkait (MA dan KY) Tanggapi Permohonan Uji Materi UU KY	Di Unduh : 3

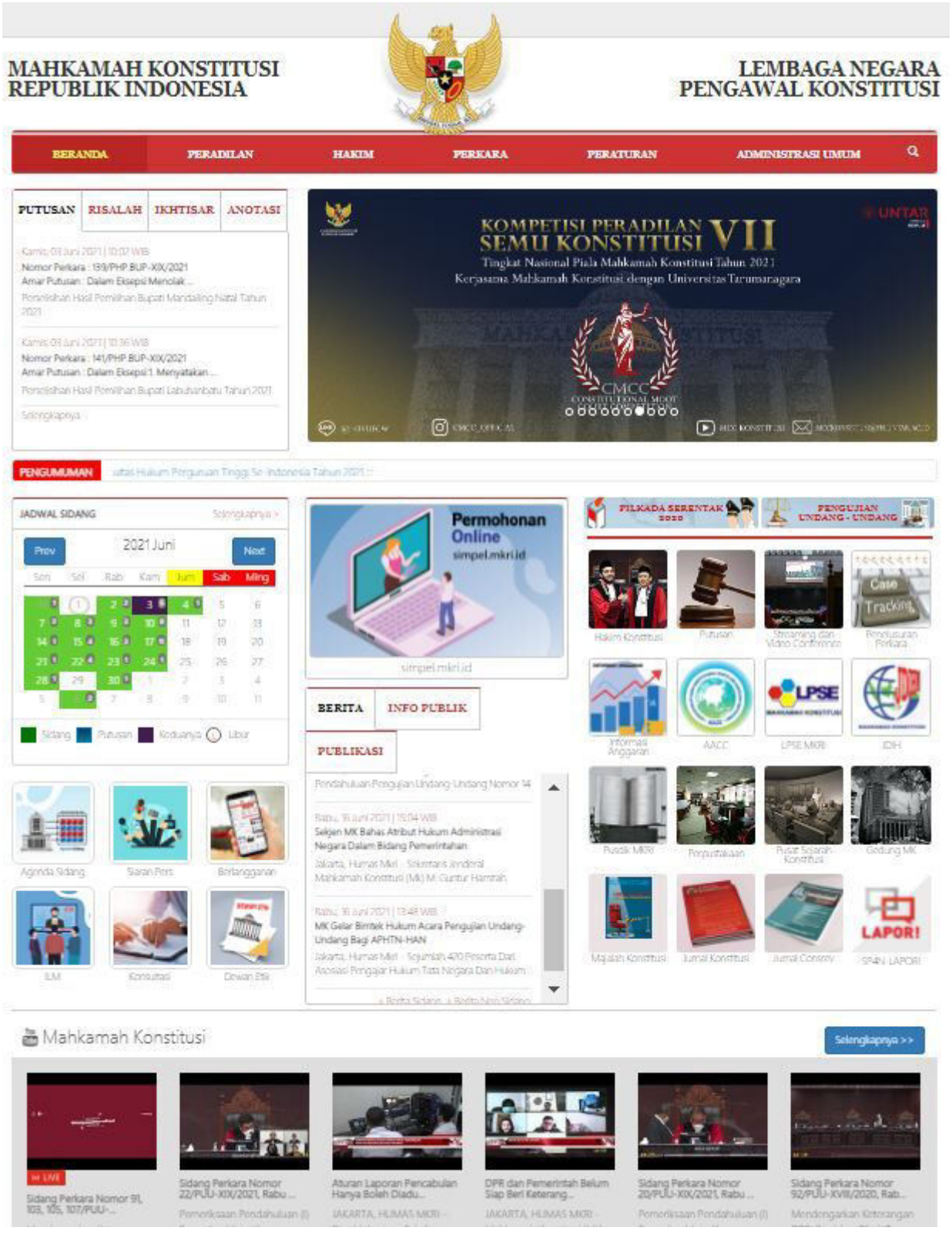
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI
BERANDA
PERADILAN
HAKIM
PERKARA
PERATURAN
ADMINISTRASI UMUM
PUTUSAN
RISALAH
IKHTISAR
ANOTASI
Nomor Perkara : 139/PHP.BUP-XIX/2021
Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak ...
Nomor Perkara : 141/PHP.BUP-XIX/2021
Amar Putusan : Dalam Eksepsi:1. Menyatakan ...
Selengkapnya
KOMPETISI PERADILAN SEMU KONSTITUSI VII
Tingkat Nasional Piala Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Tarumanagara
CMCC
CONSTITUTIONAL MOOT
PENGUMUMAN
JADWAL SIDANG
Selengkapnya
Prev
2021 Juni
Next
Sidang
Putusan
Keduanya
Libur
Permohonan
Online
simpel.mkri.id
simpel.mkri.id
PILKADA SERENTAK 2020
PENGUJIAN UNDANG - UNDANG
Hakim Konstitusi
Putusan
Streaming dan Video Conference
Penelusuran Perkara
Case Tracking
Informasi Anggaran
AACC
UPSE MKRI
IDIH
Pusdik MKRI
Perpustakaan
Pusat Sejarah Konstitusi
Gedung MK
Majalah Konstitusi
Jurnal Konstitusi
Jurnal Consrev
SPAN LAPOR!
Agenda Sidang
Siaran Pers
Berlangganan
ILM
Konsultasi
Dewan Etik
BERITA
INFO PUBLIK
PUBLIKASI
Pendahuluan-Pengujian Undang-Undang Nomor 14
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:04 WIB
Sekjen MK Bahas Atribut Hukum Administrasi Negara Dalam Bidang Pemerintahan
Jakarta, Humas MKRI : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah
Rabu, 16 Juni 2021 | 13:48 WIB
MK Gelar Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi APHTN-HAN
Jakarta, Humas MKRI : Sejumlah 470 Peserta Dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum
Mahkamah Konstitusi
Selengkapnya >>
LIVE
Sidang Perkara Nomor 91, 103, 105, 107/PUU-...
Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021, Rabu ...
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Aturan Laporan Pencabulan Hanya Boleh Diadu...
JAKARTA, HUMAS MKRI
DPR dan Pemerintah Belum Siap Beri Keterang...
JAKARTA, HUMAS MKRI
Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021, Rabu ...
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Sidang Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020, Rab...
Mendengarkan Keterangan

LINK SIARAN PERS DI LAMAN MK

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Press&id=1&pages=1&menu=7

Siaran Pers | press_1877_ | press_1878_ | Spotify – SU | (169) Sic | (169) ANTAR | WhatsApp | Menu Intern | Hasil Pencar | Inbox (2,202
mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1877_17.06.21%2024.PUU-XIX.2021%20I%20UU%20Kepailitan%20MHM.pdf
Apps | Getting Started | Customize Links | Free Hotmail | Windows Marketpl... | Windows | Majo no Jouken | W... | Windows Media | TIPS Mendapatkan... | Informasi Beasiswa... | Other bookmarks | Reading list
press_1877_17.06.21 24.PUU-XIX.2021 I UU Kepailitan MHM.pdf 1 / 1 62%

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Merasa Tidak Mendapat Keadilan Dalam Sengketa, UU Kepailitan di Ajukan

Jakarta, 16 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap UUD 1945 pada Kamis (17/06), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 23/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Calvin Bambang Hartono. Norma yang diujikan adalah:

Pengujian materiil UU 37/2004:
1. Pasal 31 ayat (1):
"Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.."

Dalam Permohonannya, Pemohon menjelaskan kronologis adanya perjanjian kredit dengan bank swasta, kemudian adanya penjualan objek tanah dan bangunan milik Pemohon yang menjadi jaminan Pemohon, hingga timbul nya sengketa dalam pembayaran yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Frasa "Putusan Pernyataan Pailit Berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur" sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (**MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI 2020

MENEGUHKAN SUPREMASI KONSTITUSI DI MASA PANDEMI

LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2020

MENEGUHKAN SUPREMASI KONSTITUSI DI MASA PANDEMI

Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2020

XLVIII + 224 hal; 210 x 297 mm
Cetakan Pertama, Januari 2021

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Penerbit
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177 PO BOX 999 JKT 10000
email: office@mkr.id
www.mkri.id

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2020

Pengarah
M. Guntur Hamzah
Muhidin

Penanggung Jawab
Heru Setiawan

Koordinator
Triyono Eddy Budhiarto
Wiryanto
Ida Ria Tambunan
Pawit Haryanto
Kurniasih Panti Rahayu
Tatang Garjito
Teguh Wahyudi
Budi Achmad Djohari
Elizabeth
Imam Margono
Sigit Purnomo

Ketua
Fajar Laksono

Sekretaris
Mutia Fria Darsini

Penyelaras Akhir
Fajar Laksono

Desain Cover
Hermanto

Desain Dan Tata Letak
Hermanto
Teguh Birawa Putra
Rudi
Nur Budiman

Dokumentasi Foto
Gani
Ifa Dwi Septian

Penulis
Nur Rosihin
Lulu Anjarsari P.
Nano Tresna A.
Ilham Wiryadi
Panji Erawan
Utami Argawati
Sri Pujianti
Bayu Wicaksono
Fitri Yuliana
Raisa Ayuditha Marsaulina

Bahan dan Data
Yossy Adriva
Sri Handayani
Nanang Subekti
Johan Yustisianto
Immanuel P. Hutasoit
Indah Apriyanti
Budi Wijayanto
Andi Hakim
Rimas Kautsar
Hermita Uly Artha Sinurat
Ardiansyah Salim
Akbar Anantajaya
Surya Murni Pangesti Lestari
Nerpi Juita Sinurat
Jefriyanto
Yogi Djatnika
Abdul Basid Fuadi
Fazlur Rahman
Suhardi
Syarief Hidayatullah Az Zaky
Santi Widiastuti
Rudi Kurniawan
Annisa Lestari
Andhini Sayu Fauzia
Tiara Agustina
Ilham Erwin
Zahra Marida Putri

VISI

Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya

MISI

Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara

Meningkatkan Kualitas Putusan

KEWENANGAN

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Di samping kewenangan di atas, MK memiliki kewenangan tambahan berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus

DAFTAR ISI

JEJAK KONSTITUSI VII

DARI PENERBIT XIII

SAMBUTAN KETUA MK XIV

PROFIL HAKIM KONSTITUSI XVII

PROFIL DEWAN ETIK XXXIX

1. PENDAHULUAN 1

2. PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI 7

A. Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) 11

B. *Landmark Decision* 17

C. Penguatan dan Pemantapan Hukum Acara MK 25

D. Dukungan Teknis Administratif Peradilan 28

3. PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA 31

A. Pemahaman Pancasila dan Konstitusi bagi Semua Kalangan 33

B. Penelitian dan Pengkajian 45

C. Perkembangan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK 57

D. Penyebarluasan Informasi Konstitusi di Masa Pandemi 70

4. PENGEMBANGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN NASIONAL 85

A. Kerja Sama Luar Negeri 87

B. Kerja Sama Dalam Negeri 99

5. PENGUATAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN 105

A. Pengembangan Sumber Daya Manusia 107

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 120

C. Prasarana 122
D. Pengawasan 127
E. Arsip 135

6. PENGHARGAAN 141
Apresiasi Publik Terhadap Kinerja MK 143

7. LAPORAN KEUANGAN MK 149

8. PENUTUP 155

LAMPIRAN 159

JEJAK KONSTITUSI
2020

JAN

06

MK mengabulkan permohonan pengujian UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia untuk sebagian (No. 18/PUU-XVII/2019) terkait eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

07

Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2020-2025 di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta.

28

Sidang Pleno Khusus dengan agenda menyampaikan Laporan Tahunan 2019 di Ruang Sidang Pleno MK.

29

MK melalui Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019 menegaskan nomenklatur Panwas dalam UU Pilkada harus merujuk pada UU Pemilu.

26

MK meraih penghargaan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

22

Wakil Ketua MKRI Aswanto menghadiri acara *International Judicial Conference 2020 on Judiciary and The Changing World* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung India di New Delhi.

17

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Medan Merdeka Barat diserahterimakan kepada MK.

FEB

05

Penandatanganan nota kesepahaman MK dengan Nuffic Neso.

MAR 10

Tim Poliklinik MK melakukan pemeriksaan suhu tubuh Ketua MK Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto di Gedung MK dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus corona.

16

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) menetapkan tidak ada kegiatan persidangan di MK mulai 17 Maret 2020, kecuali ditentukan lain oleh MK.

30

MK menggelar rapat pembahasan secara virtual terkait agenda penyelenggaraan sidang terhadap perkara-perkara yang dalam proses, baik untuk sidang lanjutan maupun sidang putusan.

APR 28

Sidang perkara Nomor 23, 24, 25/PUU-XVIII/2020 merupakan sidang perdana selama masa pandemi yang diselenggarakan dengan penerapan pola *physical distancing* sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur Kementerian Kesehatan RI dan WHO.

JUN 01

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual dari Gedung MK.

28

Keluarga besar MK menggelar Halalbihalal Idul Fitri 1441 Hijriyah melalui aplikasi Zoom ini dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, para hakim konstitusi dan seluruh pegawai.

MEI 08

Ketua MK Anwar Usman serta jajaran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melepas pegawai purna tugas.

30

Manahan MP Sitompul mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi masa jabatan 2020-2025 di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

JUL 06

MK menggelar prasimulasi penerimaan permohonan perkara di aula Gedung MK dalam rangka persiapan penanganan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

05

MK gelar pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

17

Simulasi dan sinkronisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Berbasis IT.

03

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Kepala Biro Umum di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi (MK) digelar di lantai 11 Gedung MK.

AGU 13

Ketua MK Anwar Usman menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Laporan Keuangan MK Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SEP 02

Peluncuran buku dalam rangka memperingati HUT ke-17 Mahkamah Konstitusi yang diikuti dengan kegiatan bedah buku secara daring dan luring sesuai protokol kesehatan.

25

Sekjen MK M. Guntur Hamzah menghadiri rapat kerja sekaligus menyaksikan langsung penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang MK.

26

Kongres ke-IV AACC yang digelar oleh Dewan Konstitusi Kazakhstan selaku presiden asosiasi, dihadiri oleh 17 negara anggota secara daring termasuk MKRI.

22

MK kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.

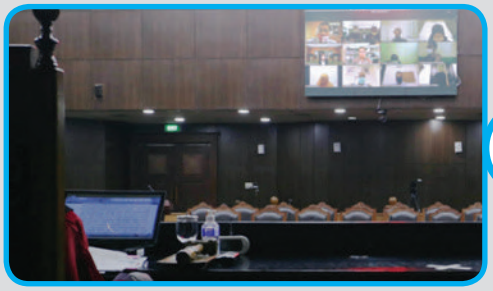

28

MK mengabulkan Putusan No. 10/PUU-XVIII/2020 untuk sebagian permohonan pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terkait aturan mengenai mekanisme pengangkatan serta periode masa jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.

OKT

08

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut UU Penanganan Covid justru untuk melindungi masyarakat dalam sidang uji materiil perkara Nomor 37, 42, 45, 47, 49, 75/PUU-XVIII/2020.

23

Pelepasan pegawai purna tugas digelar MK di lantai 11 Gedung MK disaksikan seluruh pegawai MK baik langsung maupun secara virtual.

27

Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerima Medali Peringatan 25 Tahun Referendum Konstitusi Kazakhstan di ruang delegasi Gedung MK yang diserahkan Duta Besar Republik Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov.

DES

21

Sekjen MK M Guntur Hamzah bersama Plt Kapusdik MK Imam Margono menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (21/12) secara virtual di Gedung MK.

24

MK menerima Anugerah Komisi Informasi Publik (KIP) Tahun 2020 sebagai Badan Publik Kategori "Menuju Informatif".

NOV

11

Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana. Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Suhartoyo menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama.

27

BHINNEKA TUNGGAL IKA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DARI PENERBIT

Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 telah memengaruhi secara signifikan kondisi sosial politik dan ekonomi di hampir semua negara. Pandemi telah membuat sketsa tantangan baru berkait dengan tata kelola negara. Di banyak negara, langkah-langkah yang diarahkan pada penguatan supremasi hukum dan konstitusionalisme mengalami dinamika. Pandemi Covid-19 ini menjadi ujian yang nyata bagi praktik demokrasi konstitusional di seluruh dunia dengan cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada konteks kondisi demikian itulah, pada tahun 2020 ini, Mahkamah Konstitusi juga memiliki dan mengalami tantangan tersendiri untuk meneguhkan supremasi konstitusi. Dalam masa pandemi semacam ini, peran Mahkamah Konstitusi dalam meneguhkan nilai dan konstitusionalisme terus dilakukan. Mahkamah Konstitusi tettap memainkan peran aktif dalam memantau dan memastikan hukum dan konstitusionalisme tetap berdenyut.

Berkenaan dengan hal tersebut, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ini memotret secara keseluruhan kiprah dan aktivitas Mahkamah Konstitusi dalam meneguhkan supremasi konstitusi di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Laporan Tahunan ini mengusung tema "Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi". Di tengah pandemi, Mahkamah Konstitusi berkomitmen tidak terhenti untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pencari keadilan. Justru dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk lebih proaktif dalam kerangka tatanan kenormalan baru yang mengiringinya.

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2020 ini menyuguhkan informasi secara objektif kepada publik. Baik menyangkut pelaksanaan tugas dan kewenanganan konstitusional Mahkamah Konstitusi maupun segenap program serta kegiatan yang dilaksanakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai *supporting system* Mahkamah Konstitusi. Singkatnya, melalui Laporan Tahunan ini akan digambarkan seluruh aspek dan dinamika yang terjadi dan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk meneguhkan supremasi konstitusi di masa pandemi.

Selain sebagai perwujudan prinsip transparansi kepada publik, Laporan Tahunan ini menjadi media untuk membuktikan bahwa apapun yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan penanganan perkara konstitusi, sejatinya merupakan milik atau domain publik. Atas dasar itu, merupakan hak publik untuk mengetahui bahwa hakim dan segenap aparat Mahkamah Konstitusi betul-betul melaksanakan tugas dengan cara-cara yang adil dan dapat dipercaya. Untuk itu pula, Mahkamah Konstitusi mematut dan meniscayakan diri agar sedapat mungkin mampu memenuhi hak publik tersebut. Mudah-mudahan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ini dapat menyajikan informasi sebagaimana yang diharapkan sekaligus dapat memberikan manfaat kepada sekalian pembaca.

Akhirnya, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Hakim Konstitusi, ucapan terima kasih dihaturkan atas arahan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Tahunan ini. Kepada tim penulis, tim penyusun, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi rampungnya Laporan Tahunan ini, diucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Selamat membaca.

Salam Konstitusi!

Sekretaris Jenderal,

M. Guntur Hamzah

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

SAMBUTAN KETUA MK

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Laporan tahunan adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk memenuhi kewajibannya sebagai salah satu penyelenggara negara di bidang kekuasaan kehakiman. Laporan ini juga sekaligus merupakan ikhtiar untuk memenuhi hak atas informasi bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan yang ingin mengetahui aktivitas Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2020. Dengan diterbitkannya laporan berkala setiap tahun, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dan partisipasi masyarakat, di dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Peran dan partisipasi masyarakat di dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, adalah elemen penting di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Karena dengan peran dan keterlibatan, serta partisipasi masyarakat, di dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, dapat menjadi tolok ukur penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang telah diikhtiarkan MK di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakannya. Selain itu, dengan tingginya peran dan keterlibatan masyarakat di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, hal tersebut juga dapat menjadi ukuran tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada MK.

Kepercayaan publik di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat mutlak. Mengingat bahwa lembaga peradilan adalah lembaga kekuasaan negara yang bersifat pasif. Ia akan bekerja, manakala terdapat aduan atau permohonan dari individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan keadilan, dalam rangka penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, kepercayaan publik, harus terus dijaga dan dirawat dengan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan penyelenggaraan lembaga negara yang baik. Jika tidak, maka tingkat kepercayaan publik yang menurun, dapat berujung kepada malfungsi (*malfunction*) pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang tentu saja dapat berimplikasi luas terhadap penyelenggaraan negara secara umum.

Pelibatan masyarakat di dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh MK, juga merupakan bagian dari pembudayaan hukum di masyarakat. Pembangunan budaya hukum dengan pelibatan masyarakat di dalam setiap pelaksanaan kegiatan, akan menciptakan hubungan resiprokal yang bersifat evolutif dan natural. Sehingga budaya hukum yang terbangun, akan membentuk karakter yang kuat.

Dalam kondisi di tengah pandemi saat ini yang tengah dialami oleh berbagai negara di dunia, tidak terkecuali negara kita, peran dan keterlibatan masyarakat di dalam penegakkan hukum dan konstitusi menjadi sangat penting dan utama. Pada satu sisi, kesehatan individu dan masyarakat tetap harus dijaga, namun pada saat yang bersamaan, hukum dan konstitusi juga wajib dilaksanakan. Tanpa peran dan keterlibatan masyarakat yang aktif dan partisipatif, mustahil keduanya dapat dilaksanakan dan berjalan beriringan. Oleh karena itu, ikhtiar untuk selalu bersama-sama, antara Mahkamah Konstitusi bersama seluruh elemen masyarakat, dalam rangka mewujudkan tegaknya hukum dan konstitusi, harus terus terjaga dan terjalin dengan baik.

Akhirnya, atas segala kontribusi dan partisipasi yang telah diberikan oleh semua pihak kepada Mahkamah Konstitusi selama tahun 2020 ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga setiap amal baik oleh semua pihak di dalam ikhtiar untuk "Menegakkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi", menjadi pahala yang berlipat ganda di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

HAKIM KONSTITUSI

MAHKAMAH
INDONESIA MAJU
DIRGAHAYU MAHK

H KONSTITUSI
mkri.id
MENGAWAL KONSTITUSI
KAMAH KONSTITUSI RI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2011-2016 dan 2016-2021)**
- **Hakim Pengadilan Negeri Jakarta sekaligus Kepala Diklat Departemen Kehakiman**
- **Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta**
- **Magister Ilmu Hukum dari STIH "IBLAM" Jakarta**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada**

Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Anwar Usman memulai karier sebagai guru honorer pada 1975. Pria kelahiran 31 Desember 1956 ini mengatakan, hal itu semua adalah kehendak Tuhan. Anwar yang tumbuh besar di desa Rasabou, Bolo, Bima Nusa Tenggara Barat, mengaku dirinya terbiasa hidup mandiri. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Anwar melanjutkan studi di Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri selama 6 tahun. Anwar kemudian memilih untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Jakarta, hingga meraih gelar Sarjana Hukum pada 1984.

Selama kuliah, waktu senggangnya banyak diisi dengan aktivitas kelompok drama di bawah arahan Ismail Subarjo. Ia juga tercatat aktif sebagai anggota Studio Aksara. Kecintaannya pada seni peran mengantarkannya untuk unjuk kebolehan dalam film yang dibintangi oleh Nungki Kusumastuti, Rini S. Bono, dan Frans Tumbuan pada 1980.

Pada 1985 Anwar berhasil menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Karirnya di Mahkamah Agung sempat mengantarkan dirinya pada beberapa jabatan, di antaranya Asisten Hakim Agung pada 1997-2003, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung pada 2003- 2006, serta Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung periode 2006- 2011. Karir kehakimannya terus mengalir hingga menjadi Hakim Konstitusi pada 2010. Selanjutnya pada 12 Januari 2015 ia terpilih menjadi Wakil Ketua MKRI untuk periode 2015-2017. Lalu pada Senin 2 April 2018, ia terpilih sebagai Ketua MK melalui rapat pleno hakim. Anwar menggantikan Arief Hidayat yang mengakhiri masa jabatannya sebagai Hakim Konsitusi masa jabatan 2013-2018.

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2014-2019 dan 2019-2024)**
- **Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin**
- **Magister Ilmu Pertahanan Negara dari Universitas Gadjah Mada**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga**
- **Diploma Forensik dan Hak Asasi Manusia, Institute of Groningen State, Belanda**

Bagi Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin (Unhas) ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sama sekali bukan hal yang asing. Seringkali ia menjadi narasumber dalam pelatihan penanganan sengketa pemilu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Bogor. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dirinya merupakan salah satu mitra MK dalam penyediaan fasilitas *video conference.* Ia juga mengajar di berbagai tingkatan di Universitas Hasanuddin dan mengantarkan pria kelahiran Palopo, 17 Juli 1964 ini pada sejumlah aktivitas.

Perjalanan untuk memperoleh amanah sebagai hakim konstitusi, bagi Aswanto sama sekali tidak mudah. Banyak halangan yang harus dia hadapi sebelum bisa mengabdi sebagai hakim konstitusi. Karakternya yang tegas membuat ia tidak disukai oleh beberapa orang. Latar belakangnya sebagai ahli hukum pidana pun dipertanyakan, karena hakim konstitusi pada umumnya adalah para ahli hukum tata negara. Ia mengakui latar belakang pendidikannya beragam. Sebagai Sarjana Hukum dari Unhas, ia melanjutkan pendidikan pertahanan negara di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan disertasinya di Universitas Airlangga (Unair) yang mengantarkan gelar doktor padanya lebih banyak membicarakan isu HAM.

Namun demikian, pengalaman dan keahliannya mampu menghapus semua keraguan. Ia pun terpilih menjadi hakim konstitusi pada 2013. Kemudian, Aswanto terpilih sebagai wakil ketua menggantikan Anwar Usman yang terpilih sebagai Ketua MK. Aswanto terpilih melalui hasil voting dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terbuka oleh sembilan hakim usai pemilihan Ketua MK pada Senin 2 April 2018. Dari hasil pemungutan suara, Aswanto memperoleh lima suara. Jumlah ini selisih tipis dengan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang memperoleh empat suara. Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, Aswanto terpilih sebagai Wakil Ketua MK masa jabatan 2018-2020.

Prof.
Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2013-2018 dan 2018-2023)**
- **Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro**
- **Magister Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro**

Sejak kecil Arief Hidayat selalu menginginkan menjadi pengajar, bukan menjadi hakim. Beberapa tahun lalu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqqie, pernah mengajaknya ikut dalam pencalonan hakim konstitusi. Namun tugas menjadi dekan di almamaternya menghalangi dirinya untuk menuruti ajakan tersebut. "Menjadi hakim konstitusi adalah suatu kehormatan dan ketika itu saya merasa belum pantas untuk menduduki jabatan tersebut," ujar pria kelahiran Semarang, 3 Februari 1956.

Hingga akhirnya ia memberanikan diri mendaftar sebagai Hakim MK melalui jalur DPR. Arief mengusung makalah bertajuk "Prinsip Ultra Petita dalam Putusan MK terkait Pengujian UU terhadap UUD 1945". Dinilai konsisten dengan paparan yang telah disampaikan dalam proses *fit and proper test* tersebut, ia pun terpilih menjadi hakim konstitusi. Tepat 1 April 2013 di Istana Negara, ia berdiri di hadapan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan sumpah jabatan sebagai satu dari sembilan 'pilar' Mahkamah Konstitusi. Arief menggantikan Mahfud MD yang mengakhiri masa jabatan sebagai hakim konstitusi yang telah diembannya sejak 2008.

Bagi Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro ini, MK sama sekali bukan hal yang asing. Pria ini sudah mengetahui seluk beluk MK karena keahliannya dalam bidang hukum ketatanegaraan. Selain mengajar, ia juga menjadi ketua beberapa lembaga terkait, seperti Asosiasi Dosen se-Jawa Tengah, Pusat Studi Konstitusi dan Demokrasi, Asosiasi Dosen Gender Indonesia dan Pusat Studi Lingkungan. Karya tulis yang dihasilkan juga menambah panjang daftar prestasinya. Setidaknya tercatat 25 karya tulisnya telah dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Setelah beberapa saat menduduki jabatan hakim konstitusi, karier Arief Hidayat semakin lengkap ketika ia terpilih sebagai Wakil Ketua MK pada akhir 2013. Selanjutnya, ia terpilih menjadi Ketua MK untuk masa jabatan 2015 - 2017 dan terpilih lagi untuk masa jabatan 2017 - 2020.

Prof.
Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

HAKIM KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2014-2019 dan 2019-2024)**
- **Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham**
- **Sarjana Hukum Syariah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta**
- **Magister Ilmu Hukum Syariah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah**
- **Doktor ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah**
- **De Postdoctorate Wetgevingsteer di Leiden, Belanda**

Wahiduddin Adams menghabiskan masa kecilnya di Salatiga, kampung kecil di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pendidikan agama selalu ditanamkan padanya dan dijadikan prioritas. Tak heran jika kemudian ia disekolahkan di sekolah Islam hingga jenjang sekolah menengah. Ia kemudian memilih melanjutkan pendidikan hukum syariah di Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tak berhenti sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikan pada program studi yang sama di kampus yang sama, hingga ia mendapat gelar doktoralnya.

Pada 2005, ia memutuskan untuk mengambil kuliah hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan demikian lengkaplah sudah pendidikan hukum yang ia miliki. Meskipun baru bergabung bersama MK, Wahiduddin sama sekali tidak asing dengan lembaga peradilan ini. Jabatan sebelumnya mengharuskan ia untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, karena sebagai Dirjen Peraturan Perundang-undangan, ia bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah dalam sidang pengujian Undang-Undang di MK.

"Menghadiri persidangan, bertemu para hakim semuanya sangat akrab bagi saya," ujarnya. Pria kelahiran Palembang, 17 Januari 1954 ini mengaku bahwa menjadi hakim konstitusi tidak pernah tebersit di kepalanya. Dirjen Peraturan Perundang-undangan pertama yang menjadi hakim konstitusi ini sebetulnya telah berencana menghabiskan masa pensiunnya dengan mengajar di almamaternya.

Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

HAKIM KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2015-2020 dan 2020-2025)**
- **Hakim Tinggi PT Denpasar • Ketua PN Jakarta Selatan**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia**
- **Magister Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanegara**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya**

Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang berakhir masa jabatannya sejak 7 Januari 2015. Pria kelahiran 15 November 1959 ini minatnya ketika di SMA justru pada ilmu sosial politik. Ia berharap dapat bekerja di Kementerian Luar Negeri. Namun kegagalannya menjadi mahasiswa ilmu sosial politik memberi berkah tersendiri karena ia akhirnya memilih mendaftarkan diri menjadi mahasiswa ilmu hukum "Saya tidak menyesali tidak diterima menjadi mahasiswa ilmu sosial, karena sebenarnya ilmu sosial politik sama dengan Ilmu hukum. Orientasinya tidak jauh berbeda".

Seiring waktu ia semakin tertarik mendalami ilmu hukum untuk menjadi seorang jaksa, bukan menjadi seorang hakim. Namun karena teman belajar kelompok di kampus mengajaknya untuk ikut mendaftar dalam ujian menjadi hakim, ia pun ikut serta. Takdir pun memilihkan jalan baginya. Ia menjadi hakim, terpilih di antara teman-temannya. "Justru saya yang lolos dan teman-teman saya yang mengajak tidak lolos. Akhirnya saya menjadi hakim. Rasa kebanggaan mulai muncul justru setelah menjadi hakim itu," jelas penyuka golf ini.

Pada 1986, ia pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandar Lampung. Ia pun dipercaya menjadi hakim pengadilan negeri di beberapa kota hingga 2011. Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak (2009) dan Ketua PN Pontianak (2010).

Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

HAKIM KONSTITUSI

- **Hakim Konstitusi (Masa Jabatan 2015-2020)**
- **Hakim Tinggi PT Manado**
- **Ketua Pengadilan Negeri Cilacap**
- **Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe**
- **Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara**
- **Magister Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara**
- **Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara**

Mencapai karier sebagai hakim konstitusi tak pernah terpikir oleh ayah dari tiga anak ini. Bahkan menjadi hakim di pengadilan negeri pun tak terlintas dalam benak Manahan muda. Keterbatasan ekonomi keluargalah yang menghalangi dirinya bercita-cita tinggi. Manahan yang merupakan anak kedua dari sepuluh bersaudara, harus berjuang untuk tetap memperoleh pendidikan usai lulus SMA. Ayahnya seorang pendeta bernama Ds. S.M.S Sitompul yang kemudian menjadi PNS di Jawatan Agama dan pensiun sebagai pejabat di Kandepag Propinsi Sumatera Utara Medan tahun 1977. Ibunya bernama T.M Panggabean merupakan ibu rumah tangga.

Kedua orang tuanya mendidik dengan ketat sepuluh anak-anaknya, baik untuk menuntut ilmu pengetahuan maupun dalam mengikuti pendidikan atau kegiatan kerohanian di gereja. Nasib menentukan tidak seluruh dari anak-anaknya tersebut dapat diantarkan oleh kedua orang tuanya memperoleh pendidikan di perguruan tinggi, termasuk Manahan yang harus bekerja lebih dahulu baru dapat membiayai sendiri kuliahnya.

Setamat SMA, impiannya adalah segera memperoleh pekerjaan. Dengan berbekal kursus bahasa Inggris selama tiga bulan, dia mengikuti tes di Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara dan berhasil diterima di jurusan *Flight Service Officer* (FSO). Dengan menjalani diklat sekitar dua tahun di Curug, Tangerang, ia ditugaskan pada Unit Keselamatan Penerbangan di Pelabuhan Udara Polonia Medan, dengan status PNS Golongan II A dan ikatan dinas selama tiga tahun. Sementara itu, karir hakimnya dimulai sejak dilantik di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe tahun 1986. Selanjutnya ia berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2 hingga tahun 2002 dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun. Pada 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, ia kembali dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi (PT) Manado tahun 2010, ia diminta tenaganya memberi kuliah di Universitas Negeri Manado dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S2. Pria kelahiran Tarutung, 8 Desember 1953 ini akhirnya terpilih menjadi hakim konstitusi pada 2015.

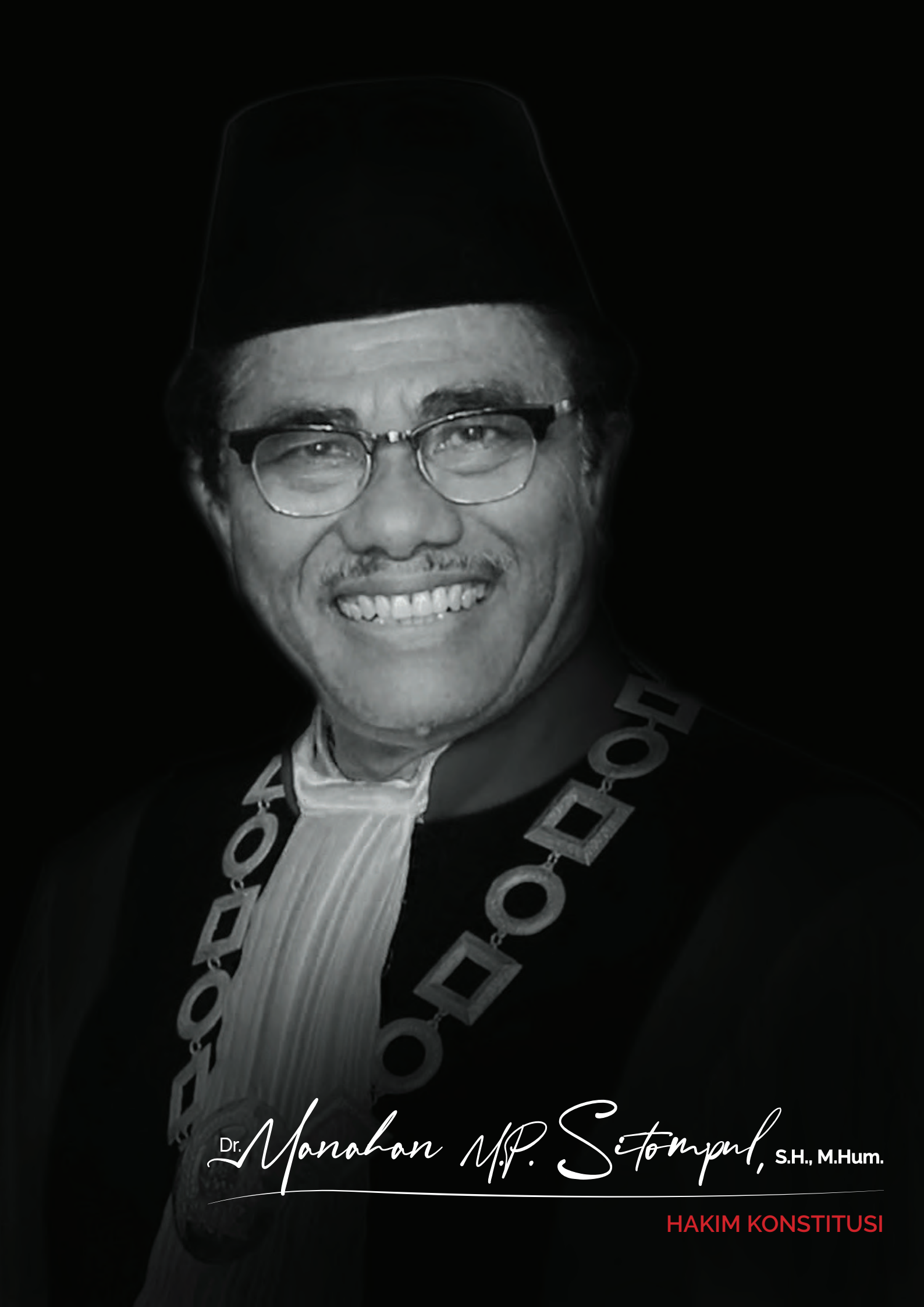

Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.

HAKIM KONSTITUSI